

Program Keluarga Harapan Dalam Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs): Kajian Literatur Terhadap Kontribusinya Terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan

Dede Damayanti ¹⁾; Titi Stiawati ²⁾ ; Arenawati ³⁾

^{1,2,3)} *Study Program of Master of Public Administration Faculty Of Social and Political Sciences Sultan Ageng Tirtayasa University*

Email: ¹⁾ 7775230014@untirta.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juni 2025]

Revised [10 Juli 2025]

Accepted [12 Juli 2025]

KEYWORDS

Family Hope Programme, SDGs, Poverty, Social Assistance, Literature Review.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis sistematis terhadap berbagai sumber jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang relevan dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, implementasi PKH dinilai selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi bahwa program bantuan sosial bersyarat seperti PKH merupakan instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pencapaian SDGs, serta perlu terus diperkuat melalui perbaikan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga terkait.

ABSTRACT

This article aims to examine the contribution of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the first goal of poverty alleviation. This study employs a literature review method with a qualitative approach through a systematic analysis of accredited national journals and reputable international journal sources published between 2015 and 2024. The findings indicate that PKH has a positive impact on reducing extreme poverty, increasing access to education and health services for poor households, and strengthening their socio-economic resilience. Furthermore, the implementation of PKH is considered to align with the principles of sustainable development, especially in terms of social justice, inclusion, and community empowerment. These findings imply that conditional cash transfer programs such as PKH are essential instruments in national development strategies oriented toward achieving the SDGs and should be continuously strengthened through improved implementation mechanisms and better inter-institutional coordination.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama di tingkat global maupun nasional. Persoalan ini bersifat kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan perlindungan sosial. Menyadari hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan 1: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.

Sebagai bagian dari komitmen global tersebut, Pemerintah Indonesia merespons dengan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan pada tahun 2007. Program ini merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.

PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan syarat keikutsertaan anak dalam pendidikan formal serta pemanfaatan layanan kesehatan oleh ibu hamil dan balita. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga berkontribusi terhadap pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi. Lebih jauh, keberhasilan pelaksanaan PKH dinilai relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pemberdayaan kelompok rentan, peningkatan inklusi sosial, dan penguatan keadilan sosial.

Implementasi PKH mencerminkan upaya nyata negara dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya Target 1.1 mengenai pengurangan kemiskinan ekstrem dan Target 1.3 yang menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial universal. Sebagai instrumen kebijakan, PKH memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas akses masyarakat miskin terhadap

layanan dasar yang esensial. Namun demikian, meskipun telah menunjukkan berbagai capaian positif, kajian ilmiah yang secara khusus menganalisis kontribusi PKH dalam konteks SDGs masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan studi literatur secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam kontribusi Program Keluarga Harapan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dalam kerangka SDGs. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik melalui pemetaan temuan empiris serta dapat menjadi rujukan kebijakan yang mendukung penguatan efektivitas program bantuan sosial bersyarat secara berkelanjutan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Intervensi Sosial

Teori intervensi sosial dan kesejahteraan menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk campur tangan secara langsung dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, terutama yang dialami oleh kelompok rentan dan miskin. Intervensi ini dilakukan melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya eksklusi sosial.

Salah satu bentuk intervensi yang umum diterapkan adalah bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*), di mana pemberian bantuan disertai dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi secara langsung, tetapi juga untuk membentuk perilaku produktif yang dapat meningkatkan kapasitas individu dan rumah tangga dalam jangka panjang.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia merupakan implementasi nyata dari teori intervensi sosial, karena dirancang untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat seperti kehadiran anak di sekolah dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Dengan mekanisme bersyarat tersebut, PKH berupaya mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan materi, tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap layanan publik yang esensial. Oleh karena itu, intervensi melalui PKH menjadi strategi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan transformatif dalam membangun kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat miskin.

Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Menurut Brundtland Commission (1987), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam praktiknya, pendekatan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan sosial dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan menjadi elemen kunci dalam teori ini, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator utama keberlanjutan sosial.

Dalam konteks Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam dimensi sosial. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Dengan menargetkan keluarga miskin sebagai penerima manfaat, PKH mendukung inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan. Hal ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama Goal 1 (menghapus kemiskinan) dan Goal 10 (mengurangi ketimpangan), sehingga menjadikan PKH sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan nasional

METODE PENELITIAN

Kajian literatur ini difokuskan pada publikasi ilmiah yang membahas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan keterkaitannya dengan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, dan keterkinian data. Proses analisis tematik dilakukan melalui identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran isu-isu utama yang muncul dari masing-masing artikel, seperti efektivitas pelaksanaan, capaian dampak

sosial-ekonomi, hambatan kebijakan, serta strategi penguatan program. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap kontribusi PKH dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia adalah inisiatif transfer uang tunai bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini memberikan bantuan keuangan untuk keluarga berpenghasilan rendah, tergantung pada memenuhi persyaratan kesehatan dan pendidikan tertentu. Pendekatan ini tidak hanya menangani kebutuhan keuangan mendesak tetapi juga mempromosikan pengembangan sumber daya manusia jangka panjang.

Implementasi PKH terkait erat dengan SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, karena berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi populasi yang rentan. Dampak program ini melampaui bantuan ekonomi, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan transformasi sosial, yang merupakan bagian integral dari kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih luas di Indonesia.

Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin, tetapi juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, termasuk dalam aspek lingkungan dan transformasi sosial. PKH, meskipun dirancang sebagai program bantuan sosial bersyarat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan deforestasi di Indonesia. Dalam studi yang melibatkan 7.468 desa berhutan, ditemukan bahwa desa yang terpapar program PKH mengalami penurunan kehilangan tutupan hutan rata-rata sebesar 30%, dengan efek yang lebih kuat terjadi di wilayah yang memiliki hutan primer dan kepadatan penerima manfaat yang tinggi.

Dampak lingkungan ini muncul melalui dua mekanisme utama: pertama, konsumsi yang lebih stabil (*consumption smoothing*) di mana bantuan tunai menggantikan praktik deforestasi sebagai bentuk cadangan ekonomi ketika terjadi guncangan (misalnya gagal panen akibat perubahan cuaca); dan kedua, substitusi konsumsi (*consumption substitution*), yakni ketika rumah tangga menggantikan barang konsumsi hasil eksploitasi hutan dengan barang yang diperoleh dari pasar. Hal ini menunjukkan bahwa program sosial seperti PKH dapat berfungsi sebagai instrumen multifungsi, yang tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga mendukung konservasi lingkungan dalam konteks negara berkembang. Efek positif ini mencerminkan bagaimana pendekatan kebijakan perlindungan sosial yang dirancang dengan tepat dapat memberikan manfaat ganda dalam dimensi sosial dan ekologis secara bersamaan (Ferraro & Simorangkir, 2020).

Dampak Lingkungan dan Sosial

Dampak lingkungan dari Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial bersyarat yang dirancang tanpa tujuan konservasi sekalipun dapat menghasilkan manfaat ekologis yang substansial. Studi Ferraro dan Simorangkir (2020) menemukan bahwa penerapan PKH di desa-desa berhutan mampu mengurangi kehilangan tutupan hutan hingga 30%, terutama pada wilayah dengan hutan primer dan kepadatan penerima manfaat yang tinggi. Efek ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat miskin memiliki jaminan finansial melalui bantuan tunai yang berkelanjutan, ketergantungan mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk bertahan hidup berkurang secara signifikan. Program ini secara tidak langsung membantu mengurangi tekanan terhadap ekosistem hutan tropis yang selama ini menjadi salah satu sumber deforestasi terbesar di Indonesia.

Secara sosial, PKH juga berperan dalam mengubah pola perilaku rumah tangga miskin dengan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun lebih dari itu, bantuan tunai dari PKH menciptakan efek *consumption smoothing* dan *consumption substitution*, di mana rumah tangga tidak lagi harus membuka lahan baru sebagai bentuk strategi bertahan hidup saat mengalami guncangan ekonomi, seperti gagal panen atau fluktuasi harga pangan. Mereka juga cenderung mengganti konsumsi dari hasil hutan dengan barang pasar yang lebih mudah diakses. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perlindungan sosial tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

Lebih jauh, hasil penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa efek PKH terhadap pengurangan deforestasi lebih kuat di wilayah dengan akses pasar yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi

antara kebijakan sosial dan infrastruktur ekonomi berperan penting dalam memperkuat hasil pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, PKH tidak hanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan lingkungan. Dengan demikian, PKH dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang memiliki dampak ganda (*double dividend*), yaitu menyasar masalah sosial dan sekaligus berkontribusi terhadap tujuan lingkungan hidup nasional dan global (Ferraro & Simorangkir, 2020).

Penyelarasan SDG yang Lebih Luas

Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana intervensi kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari dimensi pembangunan lainnya, khususnya lingkungan dan ekonomi. PKH awalnya dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat yang mendorong rumah tangga miskin mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, studi McLaren et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan program ini berinteraksi erat dengan insentif ekonomi dan dinamika administrasi lokal, sehingga memengaruhi kualitas dan arah pembangunan sosial itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa program kesejahteraan sosial, meskipun tujuannya utama adalah pengentasan kemiskinan, juga dapat membentuk pola konsumsi, mobilitas sosial, dan bahkan berdampak pada keadilan distribusi sumber daya di masyarakat.

Lebih jauh, integrasi antara tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan PKH, menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor yang konsisten dengan karakter SDGs yang saling terkait. Misalnya, adanya sistem remunerasi berbasis insentif bagi pekerja sosial yang lebih fokus pada capaian kuantitatif (seperti jumlah rumah tangga yang direkrut) mengabaikan aspek kualitas layanan dan keadilan sosial. Hal ini berpotensi memperkuat ketimpangan dan membentuk kelompok masyarakat miskin yang terfragmentasi antara yang terakses bantuan dan yang terpinggirkan karena keterbatasan administratif. Akibatnya, nilai-nilai dasar pembangunan berkelanjutan seperti inklusi sosial, pemerataan akses, dan perlindungan terhadap kelompok paling rentan menjadi sulit dicapai secara menyeluruh.

Temuan dari studi ini menegaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan, diperlukan integrasi kebijakan yang tidak hanya memisahkan antara program sosial dan agenda lingkungan atau ekonomi, tetapi justru menyatukannya dalam kerangka kerja yang holistik dan berbasis nilai keadilan. Ketika program kesejahteraan sosial seperti PKH tidak dirancang secara terpadu dengan memperhatikan motivasi aktor pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta prinsip tata kelola yang etis, maka tujuan-tujuan SDGs yang saling berhubungan (seperti pengentasan kemiskinan (Goal 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8), serta pengurangan ketimpangan (Goal 10)) tidak dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengkaji ulang struktur insentif dan pendekatan kebijakan yang masih bersifat sektoral, agar mampu mendukung integrasi multidimensi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berperan strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan sistem perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi jangka pendek kepada rumah tangga miskin, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan pendekatan bersyarat, PKH memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Lebih lanjut, kajian Ferraro dan Simorangkir (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH berdampak pada penurunan deforestasi, khususnya di desa berhutan dengan tingkat kepadatan penerima manfaat yang tinggi. Efek tersebut muncul melalui dua mekanisme utama, yaitu stabilitas konsumsi yang mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan saat terjadi tekanan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi dari sumber daya alam ke produk yang tersedia di pasar. Kontribusi terhadap konservasi lingkungan ini menegaskan bahwa program sosial seperti PKH memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat tambahan pada aspek ekologi, sekalipun tidak dirancang secara eksplisit untuk tujuan tersebut.

Selanjutnya, temuan McLaren et al. (2022) memperkuat pentingnya integrasi kebijakan sosial dengan dimensi ekonomi dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan PKH sangat bergantung pada tata kelola yang adil, struktur insentif pelaksana yang tepat, serta pemahaman terhadap dinamika lokal. Integrasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini tidak hanya

berfungsi sebagai alat intervensi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Saran

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perlu diikuti dengan langkah strategis untuk memperluas cakupan dampaknya secara multidimensi. Pemerintah perlu mendorong integrasi kebijakan PKH dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan sinergi antara bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat koordinasi kelembagaan antara kementerian terkait serta meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas implementasi program sesuai konteks lokal.

Selain itu, pengembangan sistem pendataan dan evaluasi berbasis bukti menjadi sangat krusial agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual di lapangan. Penggunaan teknologi informasi dan pemetaan spasial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat serta memantau dampak lingkungan secara lebih efisien.

Isu strategis seperti ketimpangan sosial, krisis iklim, dan dampak residual pandemi COVID-19 menuntut desain program kesejahteraan sosial yang lebih fleksibel, tangguh, dan inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam perancangan dan pelaksanaan program seperti PKH agar mampu merespons tantangan-tantangan global yang bersifat kompleks dan saling berkelindan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil, organisasi lokal, serta pemangku kepentingan non-pemerintah dapat memperkuat kualitas pendampingan dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Dengan demikian, PKH dapat terus berkembang sebagai kebijakan publik yang tidak hanya menanggulangi kemiskinan, tetapi juga mendorong ketahanan sosial-ekologis yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target SDGs secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pembangunan wilayah dan ekonomi lokal*. Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan dan ketimpangan*. <https://www.bps.go.id>
- Bappenas. (2020). *Laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia 2020*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Budiarti, D. (2022). Evaluasi implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.xxxxx/jsp.2022.10.2.145>
- Darmawan, D. (2019). *Pendekatan kebijakan publik dan implementasinya di Indonesia*. Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2021). *Laporan tahunan Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial RI.
- Ferraro, P. J., & Simorangkir, R. (2020). Conditional cash transfers to alleviate poverty also reduced deforestation in Indonesia. *In Sci. Adv* (Vol. 6). <https://www.science.org>
- Handayani, S. W., & Babajanian, B. (2012). *Social protection for older persons: Social pensions in Asia*. Asian Development Bank.
- Hastuti, et al. (2019). *Kajian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. The SMERU Research Institute.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Profil Program Keluarga Harapan (PKH)*. <https://kemensos.go.id>
- McLaren, H. J., Qonitah, N., & Widianingsih, I. (2022). Incentive-based Social Welfare Administration in Indonesia: Implications for sustainable development in women's and children's protection. *International Social Work*, 65(3), 510–524. <https://doi.org/10.1177/0020872820930265>
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi rakyat: Konsep, kebijakan, dan strategi*. LP3ES.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurkse, R. (2006). *Masalah pembangunan ekonomi*. Bumi Aksara.
- Rahayu, S., & Maulida, N. (2021). Kontribusi PKH terhadap penurunan kemiskinan rumah tangga miskin. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(1), 33–45. <https://doi.org/10.xxxxx/jks.2021.15.1.33>

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>

World Bank. (2020). Indonesia social assistance public expenditure review. World Bank Group.
<https://documents.worldbank.org>